



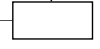





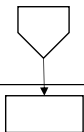

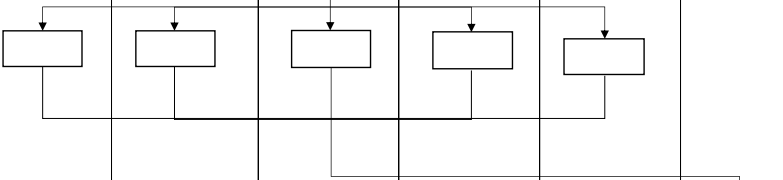

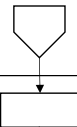




	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 013/SOP/ITJEN/05/2020
		Tgl Disahkan	: 15 Mei 2020
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="text-align: center;">  Inspektur Jenderal Ditandatangani secara elektronik GEDE PASEK SUARDIKA, DR. MSC </div>
"Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 11. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 191 Tahun 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 		<p>Lembar Kerja Penilaian harus dilengkapi dengan data dukung yang relevan.</p>	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal 2. SOP Pelaksanaan Administrasi Reformasi Birokrasi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/Komputer dengan koneksi internet 2. Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kementerian Perhubungan 3. Aplikasi PMPRB Online 4. Proyektor 5. Alat Tulis Kantor 	
Peringatan			
<p>Apabila Lembar Kerja Penilaian tidak dilengkapi dengan data dukung yang relevan, maka penilaian mandiri atas pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan tidak bisa dilakukan secara maksimal.</p>			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	Analisis Organisasi	Tim Kerja PMPRB	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengarahkan untuk mengkoordinir kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenhub							1. Peraturan Menteri PAN dan RB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB 2. Peraturan Menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	30 menit	Arahan Inspektur Jenderal	
2	Mengarahkan untuk menyusun Tim Kerja PMPRB Kemenhub							Arahan Inspektur Jenderal	30 menit	Arahan Sekretaris Inspektorat Jenderal	Tim Kerja PMPRB yang terdiri dari perwakilan unit kerja Eselon I dan Tim Kerja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kemenhub, dengan susunan tim, yaitu: Penanggung Jawab, Tim Pengarah, Tim Asessor dan Tim Pelaksana
3	Mengarahkan untuk menyusun konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub							Arahan Sekretaris Inspektorat Jenderal	30 menit	Arahan Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
4	Menyusun Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub							1. Referensi dasar hukum 2. Daftar Usulan Nama Tim dari masing-masing unit kerja di lingkungan Kemenhub 3. Arahan Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	5 hari	Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub	Daftar Usulan Nama Tim dari masing-masing unit kerja di lingkungan Kemenhub diperoleh melalui jawaban atas surat Sekretaris Itjen perihal Permintaan Nama Tim yang disampaikan ke masing-masing Tim Kerja RB Kemenhub

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Kpegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	Analisis Organisasi	Tim Kerja PMPRB	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
											
5	Memeriksa konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub							Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub	1 jam	Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub	Proses penetapan konsep SK Tim Kerja PMPRB Kemenhub sesuai dengan SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal
6	Memproses dan memparaf Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub							Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub	1 jam	Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub	
7	Memeriksa dan Menerbitkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub							Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub	1 jam	Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub	
8	Melakukan persiapan pelaksanaan Penilaian PMPRB							Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Kerja PMPRB Kemenhub	3 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Tim KemenPAN RB Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Persiapan Submit Online PMPRB Kemenhub 3. Submit Online PMPRB Kemenhub 	Agenda Pembahasan: a. Penyusunan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tim KemenPAN RB b. Pembahasan pengisian Lembar Kerja Penilaian PMPRB
9	Melakukan Pengisian Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub oleh Tim Pelaksana							Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub	15 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja Penilaian PMPRB 2. Data Dukung Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub 	Proses pengumpulan data dukung seluruh Area Perubahan mulai dilaksanakan dan terus dimonitor
											

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	Analisis Organisasi	Tim Kerja PMPRB	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
10	Melakukan Penilaian atas Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub oleh Tim Asessor							Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub	5 jam	Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub	
11	Pelaksanaan Submit Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub ke Inspektorat Jenderal							Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub	5 jam	Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub	
12	Validasi atas Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub dan Submit ke Sekretariat Jenderal Kemenhub							Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub	5 jam	Lembar Kerja Penilaian PMPRB Kemenhub	- Validasi juga mengikutsertakan Tim RB Inspektorat Jenderal - Submit ke Sekretriati Jenderal dilakukan oleh Inspektur Jenderal
											

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	Analisis Organisasi	Tim Kerja PMPRB	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
											
15	Menyetujui dan menandatangani surat dinas perihal Laporan Submit Online PMPRB Kemenhub ke Menteri Perhubungan dan memparaf surat dinas ke Menteri PAN RB							1. Berita Acara Submit Online PMPRB Kemenhub Konsep Surat Dinas 2. perihal Laporan Submit Online PMPRB Kemenhub ke Menteri Perhubungan Konsep Surat Dinas perihal Laporan Submit PMPRB Kemenhub ke Menteri PAN RB 3. PMPRB Kemenhub ke Menteri PAN RB	1 jam	1. Berita Acara Submit Online PMPRB Kemenhub Surat Dinas perihal Laporan Submit Online PMPRB Kemenhub ke Menteri Perhubungan Konsep Surat Dinas perihal Laporan Submit PMPRB Kemenhub ke Menteri PAN RB 2. Laporan Submit Online PMPRB Kemenhub ke Menteri Perhubungan Konsep Surat Dinas perihal Laporan Submit PMPRB Kemenhub ke Menteri PAN RB 3. perihal Laporan Submit PMPRB Kemenhub ke Menteri PAN RB	- Surat Dinas perihal Laporan Submit Online PMPRB Kemenhub dengan lampiran Berita Acara Submit Online disampaikan ke Menteri Perhubungan dengan tembusan seluruh Eselon I berdasarkan SOP Penanganan Surat Keluar yang dikelola oleh Bagian
16	Menerima dan menyampaikan surat dinas perihal Laporan Submit Online PMPRB Kemenhub ke Menteri PAN RB							Konsep Surat Dinas perihal Laporan Kegiatan PMPRB Kemenhub ke Menteri PAN RB	1 jam	Surat Dinas perihal Laporan Kegiatan PMPRB Kemenhub ke Menteri PAN RB	